

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi mempengaruhi bagaimana perilaku atau tindakan yang akan diambil oleh pelaku usaha sebagai stakeholder di sektor pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai aksesibilitas informasi untuk pelaku usaha pertambangan dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Badan Pelaksana, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

5.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada standar dan sasaran kebijakan yang menjadi fokus adalah sub aspek akses informasi sebagai standar dari kebijakan. Studi pustaka menunjukkan kebijakan keterbukaan informasi publik di sektor pertambangan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, dengan standar transparansi dan akses informasi yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, industri pertambangan, dan masyarakat sipil. Sasaran kebijakan melibatkan peningkatan partisipasi publik, pemastian keberlanjutan pertambangan yang bertanggung jawab, dan penguatan tata kelola sumber daya alam. Penelitian menunjukkan bahwa akses informasi di sektor pertambangan telah memadai melalui berbagai sumber, seperti *mi.esdm*, namun tetap memerlukan komitmen semua pihak untuk implementasi efektif.

5.1.2 Sumber Daya

Aspek sumber daya melihat sumber daya apa saja yang digunakan untuk menjalankan kebijakan keterbukaan informasi. Hasil penelitian pada sektor pertambangan menunjukkan bahwa informasi dibuat oleh Kementerian ESDM melalui program ESDM One Map, dengan sumber daya seperti dana dan insentif sebagai sarana implementasi. Meskipun sarana dan prasarana seperti server dan geo database telah memadai, pengurangan anggaran dan kendala terkait lisensi perangkat lunak Arc GIS dapat memengaruhi keberlanjutan program. Hasil penelitian menyoroti upaya Kementerian ESDM dalam mengatasi kendala ini melalui koordinasi, konsolidasi data, dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk lisensi email dan pusat pemulihan bencana.

5.1.3 Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik Badan Pelaksana menilai bagaimana kinerja badan pelaksana melalui kompetensi pegawai dalam menjalankan SOP yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja dari pihak ketiga menjadi aspek untuk menilai keberhasilan kebijakan. Dari hasil penelitian, Studi pustaka menyoroti SOP, struktur birokrasi, dan pengukuran kinerja oleh pihak ketiga sebagai aspek-aspek penilaian terhadap karakteristik dan kinerja badan pelaksana. Secara positif, Kementerian ESDM mendapatkan penghargaan atas keberhasilan ESDM One Map dalam menyediakan data dan integrasi dengan aplikasi lainnya, mencerminkan keberhasilan badan pelaksana dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi.

5.1.4 Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Sikap yang positif terhadap aspek transparansi menjadi kunci penting. Dari hasil penelitian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambil langkah-langkah konkret, seperti menyelenggarakan forum diskusi dan membentuk portal khusus, untuk meningkatkan transparansi informasi. Meskipun demikian, tantangan seperti kompleksitas kebijakan dan kebutuhan penyederhanaan informasi masih perlu diatasi. Dengan sikap pelaksana yang positif dan upaya konkret dalam meningkatkan transparansi, diharapkan kebijakan keterbukaan informasi dapat sukses diimplementasikan, menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan akuntabel di sektor pertambangan.

5.1.5 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam konteks sektor pertambangan di Indonesia, pelaku usaha menjadi sasaran utama kebijakan keterbukaan informasi publik. Persepsi masyarakat terhadap industri pertambangan memainkan peran sentral, mempengaruhi respons terhadap kebijakan keterbukaan informasi. Pelaku usaha perlu memahami dan merespons kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara holistik untuk mengadaptasi operasional mereka secara optimal. Kesadaran terhadap tanggung jawab sosial, partisipasi dalam inisiatif keterlibatan masyarakat, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi menjadi kunci. Tantangan melibatkan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan operasional, peningkatan transparansi, dan keterlibatan

masyarakat melalui program CSR. Pelaku usaha juga harus memastikan strategi mereka sejalan dengan nilai-nilai sosial masyarakat serta dapat memanfaatkan pengaruh positif mereka dalam mendukung perubahan kebijakan yang mendukung transparansi. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan batubara memiliki dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat terkait.

5.2 Implikasi

Merujuk pada kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka masih ada beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di sektor pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberi implikasi diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan perbaruan informasi secara berkala terkait peraturan yang ada pada sektor pertambangan
2. Diperlukan adanya keselarasan kebijakan karena masih terdapat perbedaan informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah